BAHASA POLITIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA LUDWIG WITTGENSTEIN

Oleh
Sri Rahayu Wilujeng
Pengajar Jurusan Sastra dan Bahasa Jepang
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

In Ancient Greek, human being is termed Homo ludens, a game-player animal. In Wittgenstein's perspective, politics may then be defined as a game which needs a language game as a means of communication. All political systems practiced throughout the world use language games, and the democratic system is the one most dependent to its language game. Through the game, political institutions gain vote and collect sympathy from the people. By practicing language game one persuades others in order to have same opinion or idea. Therefore, one should be careful and critical in weighing political statements, questioning what meanings lie behind them, within the democratic system.

Keywords: *Wittgenstein, language game, democracy*

A. PENDAHULUAN

Membicarakan masalah filsafat pada dasarnya sama dengan membicarakan masalah manusia. Filsafat pada awal kemunculannya berusaha menjawab problem-problem dasar manusia. Problem-problem ini sebelumnya sudah dijawab oleh tradisi mitos, namun jawaban yang diberikan tidak mampu memuaskan rasa ingin tahu manusia. Munculnya filsafat bisa dikatakan sebagai revolusi pemikiran. Sejak runtuhnya zaman mitos pada abad VI SM, maka dunia memasuki zaman baru yaitu zaman *Logos.* Pada zaman ini akal mendapatkan tempat yang terhormat. Penggunaan akal dalam mencari kebenaran, sikap kritis dalam menerima kebenaran, dan jawaban-jawaban spekulatif yang diberikan menyebabkan filsafat berkembang cepat. Perkembangan filsafat ini merupakan benih munculnya ilmu pengetahuan.

Sejarah filsafat yang sekaligus juga ilmu pengetahuan ini memang tidak tuntas dalam memberikan jawaban masalah-masalah manusia. Jawaban yang diberikan

bersifat spekulatif, terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Jawaban yang diberikan untuk sementara mampu menjelaskan problem awal filsafat seperti, epistemologi (pengetahuan), kosmologi (alam), metodologi, etika, anthropologi (manusia), teologi (Tuhan). Semakin berkembangnya rasa ingin tahu manusia, tidak hanya menyebabkan munculnya cabang-cabang filsafat tetapi juga menyebabkan munculnya ilmu-ilmu khusus yang lebih spesifik. Sejalan dengan perkembangan zaman objek pembahasan filsafatpun berkembang sedemikian beragam.

Pada abad XX filsafat mengalami pembalikan. Sering dikatakan bahwa filsafat mengalami pembalikan ke arah bahasa (*linguistic turn*). Bahasa menjadi sasaran bahasan filsafat. Istilah kunci yang dianggap pokok adalah bahasa. (Sugiharto, 79). Filsafat bahasa merupakan cabang filsafat yang muncul paling akhir di abad XX. Bahasa merupakan masalah yang penting bagi manusia. Manusia menggunakannya sejak lama sebagai media komunikasi. Pada awalnya manusia berkomunikasi dengan simbol-simbol yang merupakan bentuk bahasa yang sangat sederhana kemudian berkembang menjadi bahasa yang sangat kompleks. Bisa dikatakan bahwa bahasa sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.

Di samping bahasa masih ada masalah yang merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia yaitu masalah politik. Menurut pendapat Aristoteles manusia adalah *Animal Sociale* atau *Zoon Politicon.* Manusia adalah bianatang yang tidak dapat hidup sendiri. Ia selalu hidup bersama dan membutuhkan orang lain. Ia bukan hanya sekedar hidup berkelompok atau hidup ada bersama-sama dengan yang lain. Ia membutuhkan hidup bersama orang lain dimana terdapat saling berhubungan dan saing ketergantungan. Secara kodrati hidup bersama dengan orang lain adalah suatu kebutuhan. Dalam hidup bersama ini secara alamiah muncul suatu sistem yang mengatur kepetingan bersama.

Dalam hidup bersama ini selalu ada pihak yang lebih kuat yang berkuasa atas pihak lain. Sejalan dengan dengan semakin kompleksnya masalah-masalah dalam hidup bersama ini, maka sistem yang mengaturnyapun berkembang. Sistem ini bisa muncul secara alamiah maupu lewat rekayasa (teori atau pemikiran). Secara sederhana politik dapat diartikan suatu bidang yang berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan bersama. Dalam masalah politik selalu berkaitan dengan komunikasi. Bahasa adalah media dalam komunikasi politik.

Landasan teori yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah teori atau

pemikiran dari Ludwig Wittgenstein. Seorang filsuf penting yang mengembangkan filsafat bahasa. Filsafatnya sering disebut filsafat analitik, dalam arti bahwa analisa bahasa merupakan metode dalam filsafat. Wittgenstein mempunyai dua tahap pemikiran yang berbeda. Pemikiran tahap pertama (*Atomisme Logis*) terangkum dalam karyanya *Tractatus Logicus Philosophicus* yang menyuguhkan dalil-dalil yang sangat ketat sebagai sebuah pemikiran. Sedangkan pemikiran tahap ke dua termuat dalam karyanya *Philosophical Investigation.* Dalam tulisan ini terdapat pemikirannya tentang *Language Game* (Mustamsyir, 51) Kepustakaan pokok yang dipergunakan dalam tulisan ini memang bukan pustaka asli Wittgenstein dalam bahasa Jerman. Penulis berusaha menggunakan sumber buku dari penulis-penulis yang berkompeten yang ahli dalam penulisan filsafat Inggris-Jerman, yaitu Kees Bertens. Pemikiran dari tokoh lain seperti Austin dan pemikir lain juga dipergunakan dalam rangka menambah pemahaman dalam tulisan ini.

Tulisan ini adalah tulisan tentang masalah aktual dan faktual. Ada beberapa bidang yang tersangkut dalam tulisan ini yaitu: masalah filsafat, bahasa, dan politik. Masalah politik dalam hal ini menyangkut dua pengertian yaitu politik dalam arti umum maupun politik dalam konteks fenomena yang terjadi di percaturan politik Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi terjadi perubahan sistem politik dan peta politik yang mendasar di Indonesia. Pertarungan kepentingan, kekuasaan dewasa ini semakin tajam. Di era demokrasi ini, rakyat sebagai pemilik suara merupakan sasaran tembak dari kekuatan-kekuatan politik. Semua kekuatan politik ini membutuhkan dukungan dari rakyat. Semua berusaha mencari dukungan sebesar-besarnya untuk membangun kekuatan maupun melangsungkan kekuasaan.

Jargon-jargon politik, slogan, pidato, pernyataan politik sering dilontarkan harus disikapi secara kritis, sehingga kita tidak terjebak dan tertipu. Berkaitan dengan masalah ini filsafat bahasa tidak membicarakan tentang bahasa itu sendiri, tetapi lebih mengacu apa yang ada di balik bahasa. Tulisan ini berusaha membangun sikap kritis dalam memahami bahasa politik, sehingga pernyataan tidak diterima sebagai mana apa adanya. Tulisan ini bisa menjadi langkah awal untuk penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahasa politik pada kurun waktu tertentu atau pada pemerintahan tertentu. Beberapa kasus yang di paparkan dalam tulisan ini hanya merupakan contoh-contoh untuk bahan analisa.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian singkat masalah aktual yang

dipaparkan dalam gagasan konseptual. Tulisan ini mempunyai objek material bahasa politik terutama bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi politik terutama dalam sistem demokrasi. Objek formal tulisan ini filsafat bahasa (analitik) Ludwig Wittgestein Tahap 2. Dalam tulisan ini dipergunakan beberapa langkah metodis yaitu: (1) Deskripsi: yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang beberapa masalah mendasar yang menjadi perhatian dalam tulisan ini. Demikian juga hasil penelitian dideskripsikan secara secara jelas. (2) Interpretasi, yaitu melakukan interpretasi/penafsiran terhadap teori Wittgenstein dalam rangka melihat dan memahami bahasa politik. (3) Analisa-Sintesa, yaitu melakukan analisa secara cermat terhadap beberapa permasalahan, dicari penyebab pokok permasalahan dan hubungan beberapa hal tersebut. Dari beberapa analisa ini dibuat satu sintesa yang menghasilkan gambaran umum pembahasan dalam kerangka teori Wittgenstein. (4) Idealisasi, yaitu dengan memberikan suatu alternatif solusi terhadap permasalahan yang knya dilakukan. Alternatif solusi ini dupayakan suatu pemikiran yang ideal, namun dibahas. Alternatif ini bersifat normatif yang merupakan asumsi dasar yang selayaknya demikian.

B. BAHASA DALAM POLITIK

Permasalahan politik yang menyangkut kekuasaan, pengaturan kepentingan bersama merupakan masalah yang sangat rumit. Hal ini disebabkan karena masalah politik selalu berkaitan dengan berbagai kepentingan dari berbagai kekuatan dimana semua mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Kompleksitas masalah ini juga disebabkan tingkat relativitas dan labilitas kebenaran (politis) yang sangat tinggi. Kebenaran politis sifatnya sangat subjektif dan relatif. Perbedaan antara kebenaran dengan ketidakbenaran sangat tipis. Sesuatu yang diangap salah secara politis dengan mudah akan menjadi benar dalam perspektif pihak lain yang kemudian berkuasa. Muatan kepetingan lebih dominan dalam penentuan kebenaran atau kesalahan. Kebenaran politis lebih relatif dari pada kebenaran hukum, kebenaran ilmiah, dan kebenaran lain yang mempunyai tolok ukur yang jelas.

Politik bisa disejajarkan dengan seni, tidak ada sesuatu tidak bisa dikatakan pasti A atau pasti B. Politik lebih jauh juga merupakan seni yang melibatkan gaya dan bakat. Politik tidak hanya semata-mata adu kekuatan, tetapi bagaimana seni mengolah kekuatan sendiri maupun pihak lain.

Politik sekaligus juga merupakan permainan. Permainan dalam politik ini merupakan representasi manusia sebagai *homo luden* (binatang yang suka bermain). Olah raga ski bisa merupakan penggambaran gerak politik. Dalam olah raga ski dibutuhkan elastisitas yang tinggi agar bisa bergerak cepat, luwes menghindari dan menghadapi hambatan dan tantangan, sehingga bisa mencapai tujuan tepat pada waktunya.

Senjata yang dibutuhkan dalam dunia politik adalah diplomasi dan persepsi. Diplomasi dibutuhkan dalam hubungan horisontal sedangkan pembentukan persepsi dalam kaitannya dengan hubungan vertikal. Baik diplomasi maupun pembentukan persepsi membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini tidak hanya komunikasi verbal, tetapi juga komunikasi non verbal. Peranan bahasa sangat penting dalam politik sebagai media komunikasi. Bahasa (lama arti luas) yang tepat dibutuhkan dalam rangka diplomasi maupun pembentukan persepsi. Diplomasi dan pembentukan persepsi merupaka sarana untuk melicinkan jalan mencapai tujuan.

Dalam pandangan Yunani Kuno manusia dipandang sebagai *zoon logon echon*. Manusia adalah makhluk (binatang) yang berbicara, pengada yang memiliki *logos* (bahasa). (Sugiharto, 95) Yang menbedakan manusia dengan binatang adalah bahasa. Manusia menggunakan bahasa, sementara hewan hanya mengeluarkan suara atau bunyi. Bahasa selalu berkembang, sedangkan bunyi atau suara tidak. Munculnya bahasa menampilkan suatu transformasi mendasar dan total dari taraf kebinatangan ke taraf kemanusiaan. Bahasa merupakan kemampuan reflektif manusia. Berkat adanya bahasa manusia menjadi objek potensial bagi dirinya sendiri. Ia menjadi persoalan pokok pemahaman dirinya sendiri. Manusia bukanlah makhluk yang sudah tercetak sekali jadi secara natural melainkan produk kultural dalam konstruk linguistik (idem).

Bahasa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara pribadi maupun dalam hidup bersama. Kemampuan berbahasa sangat penting dalam pergaulan. Bahasa merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik, namun bahasa juga bisa menimbulkan konflik (Panggabean, xvii). Dalam masalah ini pengunaan bahasa dalam berpolitik membutuhkan seni tersendiri agar dapat bermain lincah. Politik itu sendiri merupakan suatu permainan dalam pertarungan. Dalam pertarungan ini aktor harus pandai memerankan peranannya. Bermain dengan menggunakan bahasa yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan.

Secara singkat alur hubungan manusia bahasa dan permainan adalah sebagai berikut. Manusia pada hakekatnya adalah *homo luden* (binatang yang bermain), politik adalah permainan. Dalam permainan ini dibutuhkan sarana yaitu bahasa. Dalam terminologi Wittgenstein dalam penggunaaan bahasa terdapat permainan bahasa. Penggunaan bahasa dalam politik dengan sendirinya merupakan permainan, yaitu permainan bahasa (*language games*). Sebagian besar tindakan manusia, termasuk tindakan politik dilakukakn lewat dan dipengaruhi oleh penggunaan dan artikulasi kebahasaan. Dalam telaah ilmu politik bahasa menempati posisi penting terutama setelah munculnya postmodernisme dan poststrukturalisme dalam epistemologi modern. Bahasa dalam dirinya sendiri tampil sebagai representasi dari pagelaran (*deployment*). Bahasa pada akhirnya dipahami sebagai salah satu space suatu ruang dimana konflik berbagai kepentingan, kekuatan, proses hegemoni dan *counter-hegemony* terjadi (Hikam, 179).

Bahasa tidak lagi dipahami sebagai medium netral yang berada di luar pembicara. Apabila dikaitkan dengan wacana politik bukan alat atau medium netral, melainkan merupakan representasi dirinnya dalam hubungan-hubungan politis tetapi merupakan ruang bagi pertarungan kuasa-kuasa tertentu (Hikam, 186-187). Pandangan ini menentang pandangan sebelumnya yang berasumsi bahwa bahasa itu netral sebagaimana pendangan kelompok lingkaran Wina seperti penganut Positivisme Logis dan Atomisme logis (pandangan Wittgenstein tahap I). Bahasa lewat struktur logis mampu menggambarkan realitas dan makna tidak lain daripada penggambaran suatu keadaan faktual dalam realitas melalui bahasa (Bertens, 43). Sebagaimana pemikiran filsuf-filsuf lingkaran Wina menggunakan landasan logis untuk menyusun suatu pemahaman dan kebanaran yang pasti. Wittgenstein mendasarkan pemikirannya dengan menggunakan logika bahasa, dengan konsepnya tentang teori gambar (*picture theory*) dan *state of affair*.

Pemikiran Wittgenstein tahap I ini pada akhirnya dikoreksi oleh pemikitran tahap II. Ia menolak terutama dalam tiga hal yang dulu menjadi landasan pemikiran tahap I. Pertama, bahwa bahasa dipakai hanya untuk satu tujuan saja yaitu menetapkan *state of affair*. Kedua, bahwa kalimat-kalimat mendapatkan maknanya dengan satu cara saja yaitu menggambarkan suatu keadaan faktual. Ketiga, setiap jenis bahasa dapat dirumuskan dalam bahasa logika yang sempurna, biarpun pada pandangan pertama barangkali sukar untuk dilihat (Bertens, 48). Dalam *Philosophical*

Investigation Wittgenstein memperkenalkan istilah *language games* (permainan bahasa). Suatu permainan dapat dilukiskan sebagai aktivitas dilakukan menurut aturan tertentu (Bertens, 49). Setiap bidang mempunyai aturan sendiri. Menurut Wittgenstein makna sebuah kata adalah tergantung penggunaanya dalam suatu kalimat, adapun makna kalimat adalah tergantung penggunaannya dalam bahasa, sedangkan makna bahasa adalah tergantung penggunaannya dalam hidup (Kaelan, 149)

Pada pemikiran tahap II terlihat jelas unsur relativitas bahasa. Tingkat relativitas dan subjektifitas dalam bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik sangat tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan bahasa di bidang lain. Hal ini tidak ada aturan yang mengatur dalam penggunaan bahasa politik. Di samping itu dalam politik sarat dengan kepentingan, motif, dimana tujuan komunikasi menjadi utama. Pameo bahwa *dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi* merupakan suatu yang tidak berlebihan.

Bahasa politik membawa ideologinya sendiri yaitu kepentingan penuturnya. Bahasa politik seringkali berwayuh arti (*multi interpretations*), *ambiguous*, bahkan menipu. Apa yang terjadi bisa jadi merupakan apa yang sebaliknya dari yang diungkapkan. Bahasa politik tidak hanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi juga untuk menyembunyikan sesuatu. Hal ini senada dengan peribahasa Perancis yang berbunyi: "*La parole a ete donne a l 'homme pour deguiser sa pense*" bahasa diberikan kepada manusia untuk menyembunyikan pikirannya. Versi lain peribahasa tersebut berbunyi: "*Les paroles sont faites pour cacher nos pensees*", bahasa-bahasa dibuat untuk menyembunyikan pikiran kita (Panggabean, vii). Para tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapat atau pikirannya, melainkan untuk menyembunyikannnya. Ia harus menyembunyikan pikirannya karena ada kepentingan yang harus dipertahannkan yang selayaknya tidak diketahui orang lain.

Semua orang yang melancarkan aksi berbahasa politik cenderung (untuk tidak mengatakan selalu) memanipulasi proses kerjasama dan menggiring pendengarnya untuk menyetujui sesuatu hal yang menurutnya paling benar dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk mempertanyakan kebenaran itu (Purwoko, 13). Bahasa politik tidak mementingkan *state of fact* tetapi lebih mementingkan implikasi dari suatu pernyataan. Seorang politikus yang hati-hati akan menggunakan kalimat yang bersayap dimana pendengar tergiring

untuk membuat kesimpulan seperti apa yang dimaksudkan walaupun apa yang diucapkan belum tentu benar dari segi fakta (Purwoko, 13). Berkaitan dengan hal ini Austin mengatakan bahwa tindakan bahasa (*speech Act*) terdiri dari tiga hal: yaitu tindakan lokusi (*locutionary act*) yaitu apa yang diucapkan penutur, tindakan ilokusi (*illocutionary act*) adalah makna atau arti di balik suatu pernyataan, dan tindakan perlokusi (*perlocutionary act*) yaitu dampak dari apa yang diucapkan penutur.

Bahasa politik lebih mementingkan tindakan perlokusi yaitu dampak dari suatu ucapan. Dalam hal ini sikap kritis sangat dibuhkan dalam memahami bahasa politik. Menurut Wilson yang juga dikutip Herudjati mengatakan bahwa ada yang khas dari bahasa politik yaitu menyentuh perasaan (*emotive*). Bahasa politik ini mengandung empat argumentasi: pertama *correct interpretation* (pendengar atau pembaca harus menginterpretasikan bahwa apa yang dinyatakan penutur selalu benar), kedua *exception*, bahwa apa yang diucapkan harus diterima oleh pendengan sebagai kekecualian yang sudah benar dan tidak perlu dikritisi, ketiga *chauvinism*, yang diajukan bukan fakta kebenaran tetapi point maksud/tujuan yang sesekali kelihatan arogan, kalau perlu dengan kata bersayap (*doubletalk*), keempat *controlled cognitive environment,* yaitu premis dari wacana politik bukan memberikan pesan melainkan menciptakan lingkungan kognitif bagi pendengar agar memiliki interpretasi seperti yang telah direkayasa (Purwoko, 17).

C. PERMAINAN BAHASA DALAM SISTEM DEMOKRASI

Di atas telah diuraikan bagaimana model dan pola-pola bahasa yang digunakan dalam politik. Dalam perpektif Wittgenstein, bahasa yang digunakan dalam politik mengandung unusr permainan. Bermain di sini adalah bermain dengan kata-kata. Selayaknya sebuah permainan orang harus memilih kata yang tepat, mengatur strategi bahkan harus berpura-pura, kapan menyerang, kapan mengalah yang terbungkus dalam kamuflase sehingga tampak seperti memenuhi aturan. Sistem politik (baca pemerintahan) mengalami perkembangan yang sangat beragam terutama setelah dunia Barat memasuki zaman *Aufklarung* yang merupakan pintu gerbang memasusi zaman modern. Pada zaman romantisme sistem yang umum berlaku adalah monarkhi, oligarkhi. Demokrasi mulai berkembang setelah memasuki zaman modern bersamaan dengan sistem-sistem lama yang masih berjalan, termasuk sistem pemerintahan diktator.

Di antara beberapa sistem politik yang berjalan, sistem demokrasilah yang

paling banyak menggunakan unsur permainan dalam penggunaan bahasa yang dalam istilah Wittgenstein *Language Games.* Permainan dalam bahasa politik ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang negative atau positif. Permainan ini selayaknya dilihat sebagai suatu fakta yang terjadi dalam fenomena pelaksanaan demokrasi yang harus disikapi secara cerdas dan kritis. Permainan bahasa dalam politik (untuk selanjutnya baca: demokrasi) adalah suatu kebutuhan.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan, memiliki suara. Kekuasaan ini akan didelegasikan, diwakilkan, diberikan kepada pihak lain. Di awal proses politik terjadi transaksi antara rakyat pemilik kuasa dengan yang mewakili pemilik kuasa. Pihak yang mewakili baik perorangan maupun lembaga membutuhkan dukungan rakyat, semakin banyak dukungan diperoleh semakin baik. Komunikasi politik yang intens perlu dilakukan. Disinilah peran bahasa sangat penting sebagai media komunikasi untuk meyakinkan, mengambil hati, menarik simpati agar rakyat memberikan suaranya.

Bahasa dalam hal ini mempunyai dua fungsi penting: pertama fungsi persuasi, kedua fungsi mengancam. Bahasa menjalankan fungsi persuasi jika bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah sikap audiens seperti apa yang diinginkannya. Bahasa yang digunakan dalam pidato, ceramah, kampanye merupakan selubung bagi suatu kepentingan. Penutur harus pintar bermain memilih bahasa yang tepat agar bisa mempengaruhi orang lain. Dengan bahasa yang tepat penutur akan bisa mempengaruhi orang lain untuk menyamakan pikiran atau ide. Ada suatu istilah menyamakan "bahasa" yang artinya menyamakan persepsi, menyatukan persepsi. Janji-janji atau pidato yang indah dan ideal sering dilontarkan untuk mencapai tujuan. Pada masa kampanye banyak sekali muncul statemen yang pantas diragukan kebenarannya yang membuat bingung orang banyak. Dalam terminologi Austin tindakan berbahasa ini disebut tindakan perlokusi, yaitu pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh isi pernyataan. Di sini terkandung unsur kesengajaan dari penutur untuk mempengaruhi pendengar secara maksimal melalui tuturan yang dilontarkan, (Mustamsyir, 118-119)

Bahasa juga mempunyai fungsi mengancam. Dalam politik internasional dikenal berberapa jenis ancaman dengan bahasa tersendiri: *detterent policy* (siasat menakutkan), ppembalasan secara masif (*massive retaliation*), siasat tepi jurang (*escalation policy*), siasat untuk melakukan serangan ke dua (*second-strike*

*capability polic*y), siasat untuk mencapai keseimbangan teror (*balance of terror policy*) (Panggabean, ix). Bahasa yang digunakan baik persuasif maupun bahasa mengancam pada dasarnya untuk mengamankan kepentingan penutur. Dalam politik penutur sering terkondisi dalam situasi dimana ia harus melakukan kebohongan, menutupi sesuatu merupakann suatu siasat mengalahkan pihak lain.

Seorang empiris Inggris Thomas Hobbes mengajukan keberatan penting tentang demokrasi. Demokrasi selalu membutuhkan retorika. Retorika hanya mengutamakan "efek" bukan isi. Retorika mengakibatkan keputusan yang ditentukan oleh penyalahgunaan pikiran (*impetus animi*) dari pada penalaran yang benar (*recta ratione*) (Sugiharto, 116-117). Retorika memburu kemenangan daripada kebenaran, sehingga bahasa yang digunakan mempunyai efek persuasi yang berfungsi pragmatis mempengaruhi pendengarnya

Hal ini terjadi bukan semata-mata kesalahan penutur. Dalam kenyataannya orang yang tidak bersikap kritis karena keterbatasannya mudah terbius dengan orasi yang memukau sehingga melupakan apa yang diungkapkan itu benar atau salah. Dunia politik memang tidak dapat dipahami semata-mata secara rasional. Terdapat unsur-unsur lain yang dominan dalam kehidupan politik, seperti ideologi, emosi, psikologi, komunikasi dan juga personofikasi. Politik baik dalam skala besar maupun kecil selalu berkaitan dengan kepentingan. Sebagaimana kata Jurgen Habermas bahwa bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang memakainya. Mereka yang memiliki kekuasaan selalu membangun bahasanya sendiri untuk mengamankan bahkan memperbesar kekuasaannya. Hal ini senada dengan para penganut Max Weber yang memandang bahwa inti kekuasaan adalah dominasi, yaitu menguasai siapa saja dan apa saja dengan segala cara. Mereka yang dikuasai berada dalam subordinasi dari yang berkuasa (Sugiharto, 45).

Permainan bahasa dalam komunikasi politik adalah suatu kebutuhan. Sejauh mana permainan ini dilakukan oleh para aktor-aktor politik tergantung dari seberapa besar ketergantungan pada pihak lain atas kekuasaannya. Suatu kekuasaan semakin tergantung pada pihak lain (dukungan rakyat) semakin akan semakin besar melakukan permainan bahasa. Pada negara dengan sistem monarkhi di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun lebih menggunakan bahasa yang lugas, apa adanya tanpa harus banyak menyampaikan kebohongan-kebohongan dalam menyampaikan informasi.

Demikian juga sistem pemerintahan dictator, mereka tidak mau sibuk dengan permainan bahasa. Mereka membangun kekuasaan tidak lewat persuasi tetapi lewat kekuatan.

Sebaliknya dalam pemerintahan demokrasi atau pemerintahan yang mengecap dirinya demokrasi intensitas permainan bahasa sangat tinggi. Pemerintahan semacam ini dibutuhkan kemampuan permainan bahasa yang sangat tinggi. Permainan ini dibutuhkan dalam rangka mengalang simpati, meraih dukungan, meyakinkan dan mempengarui orang sehingga orang percaya dan tunduk pada kemauan penguasa. Dalam pemerintahan demokrasi pembentukan citra kadangkala lebih penting dari pada tindakan nyata. Upaya membentuk kesan ini bisa dianalogkan dengan sebuah iklan parfum yang berbunyi "Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda". Dalam dunia politik fenomenanya berbunyi "Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah saya setelah berkuasa".

Di bagian akhir tulisan ini ada baiknya kita tengok praktek gaya bahasa beberapa presiden Indonesia dalam komunikasi politiknya. Pertama pemerintahan Soekarno. Pada kurun waktu ini walaupunn ada beberapa unsur-unsur pemerintahan demokrasi, tetapi pada dasarnya pemerintahan ini adalah pemerintahan otoriter. Gaya berbahasa Soekarno itu lugas (*to the point*), terbuka, komunikatif (suka humor), apa adanya, luwes, otoriter. Dalam berkomunikasi terkesan alami dan apa adanya. Ia tidak perduli apakah dicap demokratis apa tidak, ia tidak mempedulikan citra, yang terpenting adalah mengusung idealisme. Gaya bicaranya yang bombastis, mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Ia tidak takut adanya musuh-musuh dari gaya keterbukaannya, walaupun musuh itu negara besar seperti Amerika.

Yang kedua pemerintahan Soeharto. Pemerintahan ini secara yuridis-formal adalah pemerintahan demokratis, tetapi secara substasial tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pada dasarnya pemerintahan ini bersifat otoriter, namun berusaha menampilkan sosok wajah demokratis. Kebijakan-kebijakan otoriternya dikemas dalam dalam koridor hukum, sehingga segala kebijakannya secara formal tidak melanggar hukum, namun secara substansial tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan rasa keadilan. Gaya berbahasa Soeharto tertutup, santun, halus, tidak *to the point,* simbolis, terkendali, formal. Beberapa istilah dipergunakan untuk memoles beberapa kebijakan pemerintah otoriternya. Istilah *diamankan* untuk menunjuk pada tindakan menangkap

musuh-musuh politiknya. Tuduhan *tindakan subversif* dikenakan pada orang-orang yang membahayakan kekuasaannya walaupun kekuatannya sangat kecil. *Masa mengambang* dipakai untuk mobilisasi masa untuk pemenangan pemilu. Istilah *pembangunan* menggantikan program yang sarat kepentingan kelompok tertentu, dan masih banyak lagi istilah lain. Presiden B.J. Habibie menampilkan gaya berbahasa yang terbuka, meledak-ledak kadang tidak terkontrol, *to the point*.

Abdurahman Wakhid menampilkan gaya berbahasa yang santai kadang seenaknya, terbuka, to the point, mempunyai selera humor, otoriter. Sementara Megawati lebih menampilkan bahasa tubuh (tersenyum, menggeleng, mengangkat bahu), tidak banyak berkomentar, *to the point*, kurang komunikatif. Dalam beberapa kesempatan ia memilih diam. Kekurangmampuan berkomunikasi ini menjadi salah satu sebab orang meragukan kapasitasnya sebagai presiden. Anggapan ini ternyata tidak tepat, ketika pilihan dijatuhkan pada sosok yang komunikatif dan kadang terlalu banyak omong ternyata permasalahan justru banyak muncul. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono menampilkan baya berbahasa yang santun, halus, terkendali, tidak to the point, menyentuh perasaan, formal. Ia berusaha membangun citra yang baik, sangat menghindari konflik dan musuh. Menghindari kesalahan persepsi dengan menggunakan kalimat bersayap

Demikianlah gaya berbahasa beberapa presiden Indonesia menurut analisa penulis. Kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh demokratis atau tidaknya suatu pemerintahan, juga tidak ditentukan kepandaian seorang menarik simpati lewat kemampuannya berkomunikasi, tetapi ditentukan oleh hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat.

E. PENUTUP

Terdapat hubungan yang erat antara politik dan bahasa. Wacana politik tidak bisa dipisahkan dengan bahasa. Dalam kehidupan politik terutama dalam era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal. Bahasa dipergunakan sebagai media dalam komunikasi politik. Di dalam penggunaan bahasa politik terdapat permainan bahasa. Di antara berbagai sistem politik sistem demokrasilah yang paling banyak membutuhkan permainan bahasa. Dalam demokrasi pemilik suara adalah rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Pelaksana kedaulatan rakyat ini berusaha mencari simpati dan kepercayaan untuk menyerahkan kewenangannya. Dalam hal ini diperlukan bahasa persuasif untuk meyakinkan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Bakker, Anton dan Charis Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Bertens, Kees. 1983. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia.

Hikam, AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.

Kaelan. 1998. *Filsafat Bahasa, Masalah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Paradigma.

Mustamsyir, Rizal. 1987. *Filsafat Analitik: Sejarah dan Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Panggabean, Maruli. 1981. *Bahasa Pengaruh dan Peranannya*. Jakarta: Gramedia.

Purwoko, Herudjati. 2011. *Kaitan Bahasa dan Politik dalam Perspektif Budaya*. Makalah dalam Seminar Nasional FIB UNDIP, Semarang.

Sugiharto, Bambang. 1996. *Postmodernisme: Suatu Tantangan dalam Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.